



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI TEGUH WIBOWO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG
PRIOK
3. NHK : 112319

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.550.105.000**

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 492.375.000
2. Tanah Seluas 2200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 595.350.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/45 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 367.380.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 595 m2/240 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 595.000.000
5. Tanah Seluas 7836.5 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 263.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER ULTIMATE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA TIGER 2000 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 82.688.160**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 55.523.200**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 499.715.490**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	3.451.031.850
III. HUTANG	Rp.	893.482.526
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.557.549.324

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.